

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUGARAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA MAOS KIDUL  
KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP  
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S. Sos)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
Nurul Huda  
NIM. 1522104035

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Huda  
NIM : 1522104035  
Jenjang : S-1  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “penanggulangan kemiskinan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni” secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka, saya berhak menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Mei 2020  
Yang menyatakan,



**Nurul Huda**  
**NIM. 1522104035**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

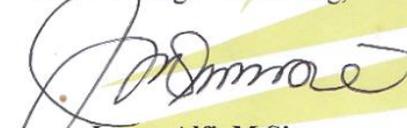
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI DI DESA MAOS KIDUL KECAMATAN MAOS KABUPATEN  
CILACAP DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**

yang disusun oleh Saudara: **Nurul Huda**, NIM. **1522104035**, Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan **Pengembangan Masyarakat**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **29 Mei 2020**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

  
**Imam Alfi, M.Si**  
NIP 19860606 201801 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
**Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Si**  
NIP 19791115 200801 1 018

**IAIN PURWOKERTO**

Penguji Utama,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19691219 199803 1 001

Mengesahkan,

Tanggal 24-6-2020

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

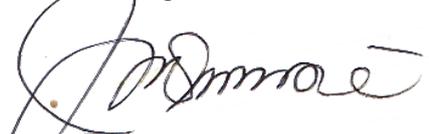
Setelah saya mengadakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nurul Huda, NIM: 1522104035 yang berjudul:  
**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA MAOS KIDUL KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, Mei 2020  
Pembimbing



**Imam Alfi, S.Sos.I., M.Si.**  
**NIP.198606062018011001**

## **MOTTO**

*“Jadilah orang baik, meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain”*



**Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di  
Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam  
Menanggulangi Kemiskinan**

**Nurul Huda  
NIM. 1522104035**

**ABSTRAK**

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sejak dulu ada, padahal kemiskinan dan kesejahteraan adalah hak yang paling asasi setiap warga negara. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya yang dilakukan pemerintah Desa Maos Kidul dengan cara memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Desa Maos Kidul.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah dengan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh warga atas program bantuan pemugaran rumah tidak layak huni. Karena program tersebut memberikan bantuan berupa barang atau material dan proses pembangunannya dikerjakan atas dasar gotong royong yang merupakan ciri khas pedesaan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Maos Kidul terjadi karena beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, dan cacat fisik atau orang berkebutuhan khusus. Dari masalah tersebut masyarakat miskin tidak dapat memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Untuk menanggulangi itu pemerintah Desa Maos Kidul memberikan bantuan berupa program pemugaran rumah tidak layak huni yang bertujuan untuk memperbaiki rumah agar menjadi layak untuk dihuni yang dimana proses pemberian bantuan mengacu pada peraturan bupati nomor 19 tahun 2019, serta memberikan pelatihan kepada warganya membuat makanan seperti keripik dan roti, selain program tersebut bagi masyarakat miskin juga mendapat bantuan berupa jaminan sosial. Proses Program pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos dilaksanakan cukup baik dan dapat diselesaikan hingga ahir karena proses evaluasi yang cukup baik.

**Kata kunci :** *Kemiskinan, Rumah Tidak Layak Huni*

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Sujud syukurku persembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan  
Maha Tinggi Atas takdirMu dan ridhoMu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir,  
berilmu, beriman dan bersabar. Semoga atas keberhasilan ini menjadi satu  
langkah menuju masa depanku, dalam meraih cita-citaku

Dengan karya ini penulis persembahkan untuk cinta kasih sayang ku kepada :  
Bapak Sumarno (Ayah), Ibu Retno Purwohastuti (Ibu), Nihayatul Afiyah (Adik),  
Sehat Ubaidillah (Adik), Yang menjadi motifasi dan inspirasi yang tiada henti  
memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk Ku. Karena  
dalam setiap sikap keluarga merupakan mata rantai ke masa lalu dan jembatan ke  
masa depan. Almamaterku IAIN PURWOKERTO yang telah memberikan  
segudang ilmu dan pengetahuan yang begitu besar.

Ungkapan terakhir..... Alhamdulillah

Terima kasih ya Allah atas rahmat dan karunia-Mu

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa tercurahkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah, inayah dan keridhoan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang mu'min mu'minat sekalian. Amiin.

Penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan" ini tidak akan selsai tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negri Purwokerto;
2. Prof. Dr. KH. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto;
3. Agus Sriyanto, M. Si., Selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Penasehat Akademik yang senantiasa selalu terbuka menerima keluhan kesah serta memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini;
4. Imam Alfi M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

5. Santoso Alip Wibowo selaku Kepala Desa Maos Kidul yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi
6. Keluarga besar perangkat Desa Maos kidul dan sebagian warganya yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga besar PMI 2015 yang telah berjuang bersama dan memberikan sejuta kebahagiaan, dukungan dan pengalaman kepada penulis.
8. Inggit Indriyan, Dimas Prayogi (gopal), Aji Nurohman Hakim (tengil), Deni Chandra Andini (chan), Ahmad Munaji (kantung), Mat Roif (jhon), Novita Suni Afriani (nopleng), Zaid Abdulloh Ridho (luraeh), Jihan Apriliani (cici) dan Dimas Zulfik (kintel) terimakasih atas bantuan, masukan dan semangatnya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih terimakasih, teiring doa *Jazakumulloh ahsanal jaza* semoga Allah membalas segala kebaikan dan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan hidup.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Mei 2020  
Penulis

**Nurul Huda**  
**NIM. 1522104035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan penelitian .....	11
E. Kajian pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran .....	20
1. Pengertian Peran .....	20
2. Dimensi Peran .....	22
3. Struktur Peran .....	22

4. Jenis Peran.....	23
5. Fungsi Peran.....	23
B. Kemiskinan .....	24
1. Definisi Kemiskinan.....	24
2. Indikator Kemiskinan.....	26
3. Teori Kemiskinan.....	29
4. Macam-Macam Kemiskinan .....	32
C. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia .....	34
1. Devinisi Rumah Tidak Layak Huni .....	37
2. Program dan Indikator rumah tidak layak huni.....	38
3. Evaluasi.....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Tempat Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data .....	57
 <b>BAB IV PENYAJIAN DATA</b>	
A. Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat di Desa Maos Kidul.....	60
B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Desa Maos Kidul.....	67
C. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Maos Kidul Kabupaten Cilacap .....	69

D. Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni .....	71
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
---------------------	----

B. Saran.....	74
---------------	----

C. Penutup.....	74
-----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I : Pemberdayaan Masyarakat</b> .....	42
<b>TABEL I : Penerima Bantuan</b> .....	84



## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah, endemik kemiskinan yang melihat rakyat Indonesia akibat dari dosa sosial yang dilakukan oleh Negara/pemerintah. Bahkan kemiskinan sering kali dikalkulasikan secara angka-angka. Padahal kemiskinan dan kesejahteraan adalah hak yang paling asasi setiap warga Negara. Pada 2007 angka kemiskinan mencapai 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Peresentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25% poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89%, turun menjadi 6,69% pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10%, turun menjadi 12,85% pada maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada

---

<sup>1</sup> Lutfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 7-8.

September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 313.232,- (73,66%). Dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 112.018,- (26,34%). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.<sup>2</sup>

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>3</sup> Kemiskinan menurut BPS yaitu ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).<sup>4</sup>

Kemudian kemiskinan menurut BKKBN yaitu kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisis kesehatan, penguasaan

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-2019> diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13.00 wib

<sup>3</sup> Chriswardani suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, dimuat dalam jurnal JMPK, vol. 08, no. 03 (Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan masyarakat universitas Diponegoro, 2005) hlm. 122

<sup>4</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 16.

aset ekonomi, ataupun akses informasi.<sup>5</sup> Selain itu kemiskinan menurut peraturan daerah provinsi jawa tengah adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>6</sup>

Realitas kemiskinan di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Sejak tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin menurun. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2017. Ini merupakan pertanda yang baik, sehingga pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah secara umum pada periode 2011-2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun presentase.<sup>8</sup> Sedangkan di kabupaten Cilacap jumlah angka kemiskinan selama enam tahun cenderung menurun, presentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap dapat diturunkan menjadi 11,25% atau 195.182 penduduk miskin. Dan kondisi masyarakat miskin di Desa Maos Kidul Kabupaten Cilacap menurut data statistik berjumlah 194 Kepala Keluarga (KK).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> “Penetapan Kreteria dan Variabel Pendapatan Penduduk Miskin yang Komprehensif Dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota “ Akhmadi dkk. Yang dimuat dalam [www.SMERU.or.id](http://www.SMERU.or.id) diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>7</sup> Afifatuz Zahra dkk., *Struktur Kemiskinan Indonesia*, dimuat dalam jurnal inovasi ekonomi, vol. 04, no. 02 (Jakarta: Program Studi Statistika, STIS, 2019) hlm. 67

<sup>8</sup> Emi megawati dkk., *Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*, dimuat dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol 7 no. 3 (Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018) hlm. 235

<sup>9</sup> Kelompok masyarakat pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Maos kidul kabupaten Cilacap

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam pembangunan yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Permasalahan perumahan juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak layak untuk dihuninya. Kemiskinan merupakan faktor utama yang ada di Desa Maos Kidul total jumlah jiwa penduduk Desa Maos Kidul berjumlah 2000 lebih jiwa. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Desa Maos Kidul dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat.<sup>10</sup>

Masalah program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Maos Kidul. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni

<sup>11</sup>Per aturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni

Landasan yuridis pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos Kidul yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Serta Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan bantuan sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Cilacap nomor 91 tahun 2019.<sup>12</sup>

Kriteria penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni:<sup>13</sup>

1. Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah
2. Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/tegel dengan kondisi tidak baik, rusak, atau kualitas rendah
4. Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai
5. Tidak memiliki jamban/memiliki jamban tidak layak.

Tujuan dan manfaat diadakannya Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni:

1. Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu meningkatkan kualitas rumah tinggalnya sehingga layak huni.
2. Tumbuhnya kegotongroyongan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan perumahan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>12</sup> Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni

<sup>13</sup> Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni

4. Terbangunnya rumah layak huni sehingga kesehatan masyarakat dapat terpenuhi
5. Terciptanya lingkungan yang bersih, indah, asri, teratur dan sehat.<sup>14</sup>

Masalah dalam pelaksanaan pemugaran program rumah tidak layak huni di Desa Maos kidul dimana dalam program tersebut masih ditemukan berbagai masalah seperti masalah pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut kurang berjalan dengan lancar karena banyak dijumpai sebagian kelompok penerima bantuan rumahnya tidak siap. Dimana dari 51 rumah yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Maos kidul hanya beberapa kelompok penerima bantuan yang rumahnya sudah siap sementara kelompok penerima bantuan yang lainnya belum siap.<sup>15</sup>

Kondisi yang terlihat pada pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Desa Maos kidul, sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni, diantaranya yaitu : belum berjalan sesuai dengan diharapkan, hal ini dapat dilihat dalam pembangunan RTLH tersebut banyak dijumpai sebagian rumah yang tak siap.<sup>16</sup>

Namun kenyataan dilapangan kegiatan pelaksanaan pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Maos kidul dalam

---

<sup>14</sup> Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni

<sup>15</sup> Kelompok Masyarakat pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Maos kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

<sup>16</sup> Kelompok Masyarakat pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Maos kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

pelaksanaannya terkesan lambat dan banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluh dan kecewa karena pembangunan program rumah tidak layak huni tersebut tidak kunjung selesai, bahkan ada rumah yang belum siap atau setengah jadi namun sudah ditempati. Namun, belum dapat dikatakan berhasil 100% karena banyak bagian rumah yang belum dipasang. Barang-barang yang dibutuhkan tidak ada karena belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembelianya. Sedangkan untuk diserahkan ke Kantor Dinas Sosial sebagai laporan atau bukti bahwa program bantuan rumah tidak layak huni tersebut sudah siap, pelaksanaan penyelenggaraan rumah tidak layak huni hanya membuat laporan hanya mengambil foto bagian depan rumah yang terlihat sudah siap sementara bagian disisi lain seperti bagian dalam rumah belum siap sama sekali.

Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Maos kidul tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana.<sup>17</sup>

Persoalan ini tentu saja merupakan permasalahan yang secepatnya untuk diselesaikan, sebab dapat berdampak kurang baik dalam pelaksanaan pembangunan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Maos kidul. Selain permasalahan umum di atas, beberapa gejala-gejala mengenai pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni. Desa Maos kidul yang meliputi, Banyak warga yang protes dikarenakan merasa adanya bantuan yang kurang tepat sasaran dan kurang maksimalnya

---

<sup>17</sup> Edi Suharto, *kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan, cet 2*, (Bandung: Alfabeta, 20013), hlm. 17.

bantuan yang diberikan sehingga mengakibatkan rumah yang dibangun tidak sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang :“Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan”.

## **B. Deifinisi Oprasional**

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahan pemahaman mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>18</sup> Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.<sup>19</sup> Selain itu menurut BPS kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, kemiskinan merupakan kondisi yang berada dibawah nilai standar kebutuhan minimum, baik makanan dan non makanan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Chriswardani suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, dimuat dalam jurnal JMPK, vol. 08, no. 03 (Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan masyarakat universitas Diponegoro, 2005) hlm. 122.

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>20</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 16.

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud kemiskinan adalah keadaan seorang individu kekurangan dalam segala hal yang berbentuk materi atau non materi.

## 2. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>21</sup> Hakikat implementasi yaitu bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Webster dalam Wahab sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo<sup>23</sup> implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Dengan demikian di sini penulis mengambil indikator tersebut untuk mendalami bagaimana implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni di desa maos kidul.

## 3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian baik

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi.html>. Diakses pada 3 desember 2019

<sup>22</sup> Rahmawati Zania, *Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018) hal. 8.

<sup>23</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 86.

secara teknis maupun non teknis<sup>24</sup>. Rumah tidak layak huni juga dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni baik sebagian maupun keseluruhan yang dilakukan gotong royong agar tercipta kondisi rumah layak sebagai tempat tinggal.<sup>25</sup> Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.<sup>26</sup> Jadi penelitian ini yang dimaksud rumah tidak layak huni adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni dan masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan suatu masalah yaitu bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui program implementasi pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos kidul Kecamatan Maos yang dilakukan pemerintah desa? Pertanyaan ini dimaksud untuk mendeskripsikan program pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos Kidul.

---

<sup>24</sup> Rahmawati Zania, *Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018) hal. 8.

<sup>25</sup> Rahmawati Zania, *Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018) hal. 8.

<sup>26</sup> Rahmawati Zania, *Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018) hal. 8.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang akan diteliti maka tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi yang dilakukan pemerintah Desa Maos Kidul melalui Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini adalah:
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ide bagi pengembangan keilmuan pertimbangan bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Sebagai pedoman/ acuan untuk pemerintah Desa Maos kidul lainnya terkait upaya tercapainya masyarakat yang lebih baik lagi dalam hal sosial maupun ekonomi.
2. Secara praktis penelitian mempunyai manfaat:
  - a. Untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah bagi Institut Agama
  - b. terutama tentang kajian Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maos Kidul.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka <sup>27</sup> adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang belum ada. Guna mendukung penelitian ini peneliti telah melakukan kajian pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan adalah

---

<sup>27</sup> Sarimah, *Pelaksanaan Pembangunan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dimuat dalam jurnal Pembangunan*, vol.1, No.1 (Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016) hlm.15.

## 1. Penelitian terdahulu

*Pertama*, berdasarkan penelitian Nur Rosita Tri Kusumuwati yang berjudul “Peran Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (ASPIN) Boyolali Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Nur Rosita Tri kusumawati bahwa penelitiannya adalah peran komunikasi yang dilakukan oleh ASPIN Boyolali dalam memberdayakan kelompok peternak dengan tiga aspek yaitu Program ASPIN Boyolali, Komunikasi Program ASPIN Boyolali, Keberhasilan ASPIN Boyolali. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui implementasinya yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkannya. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan.

*Kedua*, berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo.<sup>28</sup> Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni yang bertujuan membantu

---

<sup>28</sup> Asna Aneta, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo*, Dimuat dalam jurnal Administrasi Publik, vol.1, No.1 (Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Gorontalo, 2010) hlm.15

menanggulangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan.

*Ketiga*, berdasarkan hasil penelitian Memahami kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya adalah memahami masalah kemiskinan kronis dan rumit serta langkah-langkah strategi dalam memecahkan masalah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui implementasi dari program pemugaran rumah tidak layak huni yang bertujuan membantu menanggulangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penanggulanagn kemiskinan.<sup>29</sup>

*Keempat*, berdasarkan hasil penelitian Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang didefinisikan sebagai mustahik dalam berwira usaha. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan.<sup>30</sup>

*Kelima*, berdasarkan hasil penelitian Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan adalah mengetahui strategi pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin untuk pelaksanaan strategi nasional penanggulangan kemiskinan khususnya di

---

<sup>29</sup> Nano Prawoto, *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, dimuat dalam jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, vol 9, no 1 (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009)

<sup>30</sup> Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, dimuat dalam jurnal The journal of Tauhidinomics, vol 1, no 1 (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta)

dalam bidang perumahan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penanggulangan kemiskinan.<sup>31</sup> Se jauh pengetahuan penelitian belum ada penelitian yang mengangkat tema penanggulangan kemiskinan.

## 2. Kerangka Teoritik

Kemiskinan menurut KBBI diartikan sebagai keadaan serba kekurangan (berpenghasilan rendah)<sup>32</sup>. Kata miskin asal katanya adalah asakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu faris berkata; *“huruf sin, kaf, dan nun adalah huruf asli dan umum menandakan padas suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak”* seperti dikatakan, *sakana asy-syai’u yaskunu sukunan syakinan*. Sehingga dapat di artikan miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>33</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara

---

<sup>31</sup> I Dewa Gede Agung Diasana dan Anank Agung Gede Yana, *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, dimuat dalam jurnal Permukiman Natak, vol 5, no 2 (Fakultas Teknik, Universitas Udayana)

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/kemiskinan.html>. Diakses pada 3 desember 2019 pukul 13.15 wib

<sup>33</sup> Fauzi aris lubis, *Miskin Menurut Pandangan Al-Quran*, dimuat dalam jurnal tansiq, vol. 1, no.1 (Sumatra utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara) hlm. 72-73

maju. Di Negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang terjadi oleh hakekat dan pertumbuhan perkotaan).
- c. Kemiskinan sosial yaitu kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.<sup>34</sup>

Menurut SMERU, kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (btiadanya investasi pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.

---

<sup>34</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 16.

- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan dalam berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).<sup>35</sup>

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Korten menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan

---

<sup>35</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 17-18.

untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.

2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal<sup>36</sup>.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangun-an yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.<sup>37</sup>

Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab Negara adalah mendukung dan secara langsung menyediakan berbagai pelayanan publik yang

---

<sup>36</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 17-18.

<sup>37</sup> Yulianto kadji, *kemiskinan dan konsep teoritisnya*; guru besar kebijakan publik fakultas ekonomi dan bisnis UNG dimuat pada artikel jurnal, diakses dari repository.ung.ac.id

berlandaskan pada apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan public dalam upaya mewujudkan kesejahteraan publik (ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dsb.). tugas Negara dan pemerintah bukan menghilangkan atau membatasi perasaan dan apresiasi masyarakatnya, tetapi mendukung dan menstimulasi masyarakat untuk ikut serta mengoptimalkan kesejahteraannya. Negara dan pemerintah tidak memposisikan dirinya sebagai yang paling bisa melakukan segala hal, tetapi mendukung usaha keterlibatan masyarakat untuk menentukan apa yang terbaik dirinya.<sup>38</sup>

Perencanaan program pemberdayaan masyarakat mengutip pendapat Martinez yang menyatakan bahwa pembangunan (pedsaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial and error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlelu selalu diingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat harus direncanakan sebaik-baiknya.<sup>39</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Pada Bab pertama terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, sistematika penulisan.

---

<sup>38</sup> Lutfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 7-8.

<sup>39</sup> Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama 2014) hlm. 235-238

Bab kedua akan membahas tentang pembangunan rumah tidak layak huni. Adapun bab ketiga terdapat pembahasan tentang metode penelitian, yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab keempat akan membahas tentang penyajian data dan hasil analisis data, hasil wawancara dengan responden, dan analisis data dengan memberikan argumentasi berdasarkan dengan teori teori yang sudah ada seperti profil Desa Maos Kidul, jumlah penduduk, Pembangunan rumah tidak layak huni Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap

.Terahir yaitu bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran. Bagian akhir dari skripsi ini berupa daftar pustaka, lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

Demikian gambaran sistematika penulisan skripsi ini, semoga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya penulis tentang pembangunan rumah tidak layak huni Desa Maos Kidul Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Kata peran mempunyai arti laku, hal yang berlaku atau bertindak yang diharapkan dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam kedudukan (status) peran merupakan aspek yang dinamis, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Widodo (2001:71)<sup>40</sup>

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam system sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggungjawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam system sosial. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun diluar itu. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyelia, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.<sup>41</sup> Menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks pengharapan manusia terhadap caranya

---

<sup>40</sup> Dede Sofyan, Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Domba (Studi di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon), *skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo) Hlm.20

<sup>41</sup> Lidya Agustina, Pengaruh Konflik Peran, Ketidak jelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor, *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.1 (Bandung, Universitas Kristen Maranatha, 2009) Hlm. 42

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa.<sup>42</sup> Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan fungsi ini dalam sistem sosial.<sup>43</sup>

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengembangan peran. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.”<sup>44</sup>

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibungkus dengan posisi seseorang didalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Feri Andi, Peran Majelis Ta’lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (study terhadap majelis ta’lim nurul hidayah di desa taraman jaya kecamatan semendawai suku III kabupaten ogan komering ulu timur), *skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017

<sup>43</sup> Lidya Agustina, Pengaruh Konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor (Penelitian pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta, *Jurnal akuntansi* Vol. 1 No. 1 (Bandung; Universitas Kristen Maranatha) Hlm 42.

<sup>44</sup> Mutiawanthi, Tantangan “Role”/ peran yang dihadapi oleh mantan perawat IJ-EPA setelah kembali ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol.4 No.2 (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Al-Azhar Indonesia)Hlm 107.

- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>45</sup>

## 2. Dimensi Peran

Mengenai peran Horoeputri, Arimbi dan Santosa juga mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri, dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting.<sup>46</sup>

## 3. Struktur Peran

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen.

---

<sup>45</sup> Dwi Iriani Margayaningsih “Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat *desa jurnal Ilmu Sosial* Vol.11 No. 1 (Tapanuli utara, Universitas Sisingamaraja XII Tapanuli Utara,2018) Hlm

<sup>46</sup> Achmad Santosa Arimbi, *Peran Serta Masyarakat*, Hlm 257.

#### b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.<sup>47</sup>

#### 4. Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan diatas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

##### b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

##### c. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam masyarakat.

#### 5. Fungsi Peran

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto yang menyatakan bahwa terdapat fungsi peran dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat.<sup>49</sup> Adapun fungsi peran yaitu:

---

<sup>47</sup> Soerjono, Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara hlm 247.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara hlm 235

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Dalam kaitannya dengan penelitian ini dimana fungsi peran dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat adalah peran sebagai pemersatu prinsip.

- b. Memberi arah pada proses sosialisasi

Fungsi peran sebagai pemberi arah pada proses sosialisasi dalam hal membangun kemandirian masyarakat adalah penting adanya untuk dapat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

## B. Kemiskinan

### 1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan menurut KBBI diartikan sebagai keadaan serba kekurangan (berpenghasilan rendah)<sup>50</sup>. Kata miskin asal katanya adalah asakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu faris berkata; “*huruf sin, kaf, dan nun adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak*” seperti dikatakan, *sakana asy-syai’u yaskunu sukunan syakinan*. Sehingga dapat diartikan miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Dwi Narwoko, j, dan Suyanto, Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta Kencana, 2013), hlm 160

<sup>50</sup> <https://kbbi.web.id/kemiskinan.html>. Diakses pada 3 desember 2019 pukul 13.15 wib

<sup>51</sup> Fauzi aris lubis, *Miskin Menurut Pandangan Al-Quran*, dimuat dalam jurnal tansiq, vol. 1, no.1 (Sumatra utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara) hlm. 72-73

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional<sup>52</sup>.

Menurut Kurniawan kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang bisa digunakan adalah menurut European union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas.<sup>53</sup>

Pada konferensi PBB terkait pengembangan sosial, Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi. Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi

---

<sup>52</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 1-2

<sup>53</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 1-2

pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>54</sup> Bappenas atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.<sup>55</sup>

Chambers dan Nasikun mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan bukan hanya hidup serba kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tingkat kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>56</sup>

## 2. Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan meliputi berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Menurut SMERU, kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

---

<sup>54</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 1-2

<sup>55</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 2

<sup>56</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 2-3

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (btiadanya investasi pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan dalam berusaha karena cacat fisik maupun mental<sup>57</sup>.

Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).<sup>58</sup>

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara

---

<sup>57</sup> Agus sjafari. 2014 *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 17-18.

<sup>58</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 17-18.

normal.<sup>59</sup> Sedangkan Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah<sup>60</sup>:

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal
- b. Terbatasnya kesediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector.
- d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi (ekonomi tradisional dengan ekonomi modern)
- f. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan hidup seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- h. Tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*).
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan menurut perspektif islam kemiskinan dapat di bagi menjadi dua yaitu kemiskinan yang tidak dapat dihindari, artinya setelah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin tetapi tetap miskin dan kemiskinan tidak baik, orang yang tidak mau berusaha dan berikhtiar. Melihat pada kriteria diatas islam memang tidak memberikan indikator

---

<sup>59</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 11

<sup>60</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 17-18

kemiskinan secara menyeluruh , tapi kebutuhan hidup serta kebutuhan pokok akan sama.<sup>61</sup>.

### 3. Teori Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradig ini mempunyai perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Neo-Liberal

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobes, Jhon Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *the wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road of Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas laissez faire, yang oleh Cheyne, O`Brien, dan Belgrave (1998) disebut sebagai ide yang mengunggulkan “mekanisme pasar bebas” dan mengusulkan “*the almost complete absence of state`s in the economy*”.

---

<sup>61</sup> Fauzi aris lubis, *Miskin Menurut Pandangan Al-Quran*, dimuat dalam jurnal tansiq, vol. 1, no.1 (Sumatra utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara) hlm. 72-73

Para pendukung neo-liberal beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipicu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran Negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Penerapan program-program structural adjustment, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.<sup>62</sup>

b. Teori Demokrasi-sosial

Teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada

---

<sup>62</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 138-139.

prinsip-prinsip ekonomi campuran dan ekonomi manajemen pemerintah.<sup>63</sup>

Pendukung demokrasi-sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber seperti, pendidikan, kesehatan yang baik, dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan. Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan menulis, membaca, dan berkomunikasi.<sup>64</sup>

Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi kemiskinan harus bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi-sosial. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalna, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakna penghsilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan

---

<sup>63</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 140-141

<sup>64</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 140-141

menentukan pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

#### 4. Macam-Macam Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks. David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi.<sup>65</sup>

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju. Di Negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.<sup>66</sup>

Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang terjadi oleh hakekat dan pertumbuhan perkotaan).

- a. Kemiskinan sosial yaitu kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- b. Kemiskinan konsekuensial yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor eksternal di luar si miskin, seperti

---

<sup>65</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 17-18.

<sup>66</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 20-21.

konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relative lebih kaya.<sup>67</sup> Selain itu kemiskinan juga masih ada berbagai macam, antara lain: (1) kemiskinan kultural, dimana masyarakat dinamakan miskin kultural apabila mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar. (2) kemiskinan structural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nunung nurwati, kemiskinan: *model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan*, dimuat dalam jurnal kependudukan, vol. 10, no. 1 (Bandung : fakultas Ilmu sosial dan politik, 2008)

<sup>68</sup> Chriswardani suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, dimuat dalam jurnal JMPK, vol. 08 no.03 (Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2005).

### C. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang ada di setiap negara, tak terkecuali negara maju maupun negara berkembang, salah satunya adalah Negara kita sendiri yaitu Indonesia, untuk meminimalisir atau mengurangi angka kemiskinan pemerintah sudah pasti mempunyai program yang diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan.<sup>69</sup>

Menurut Kepala Diputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ceppie Kurniadi Sumadilaga, untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan. Pertama, mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan kedua, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi: (a) pemerataan pembagian pendapatan; (b) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah (c) pemerataan kesempatan berusaha, (d) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, (e) pemerataan kesempatan memperoleh kesehatan; dan (f) pemerataan kesempatan kerja. Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus Kabinet Indonesia Bersatu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.<sup>70</sup>

Menurut Ceppie Kurniadi Sumadilaga, kebijakan yang dituangkan dalam program- program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan

---

<sup>69</sup> Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 22-23.

<sup>70</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan program beras bagi masyarakat miskin (raskin) untuk mengurangi angka kemiskinan. Secara garis besar, program-program ini merupakan program yang bersifat short-run dan hanya memiliki multiplier effect yang rendah karena hanya dapat mereduksi gejala kemiskinan sesaat.<sup>71</sup>

Padahal, masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan di Indonesia harus mendapatkan perhatian ekstra serius dari pemerintah. Hal ini cukup penting mengingat konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap warga negaranya, terutama orang miskin.<sup>72</sup>

Tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Menurut Ceppie Kurniadi Sumadilaga ada beberapa tantangan tersebut. Pertama, menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga

---

<sup>71</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

<sup>72</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

kebutuhan pokok utama seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus di hadapi. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis.<sup>73</sup>

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Ketiga, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif. Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. Kelima, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya.<sup>74</sup>

Menurut Ceppie Kurniadi<sup>75</sup> Sumadilaga, penanggulangan kemiskinan di Indonesia akan dititikberatkan pada beberapa upaya. Pertama, mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal

---

<sup>73</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

<sup>74</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

<sup>75</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan.

Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa. Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas tiga. Ketiga, berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin.<sup>76</sup>

#### 1. Devinisi Rumah Tidak Layak Huni

Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan

---

<sup>76</sup> Emmy latifah, *harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millennium development goals*, dimuat dalam jurnal dinamika hukum, vol.11 no.3 (Solo: fakultas hukum, 2011)

nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.<sup>77</sup> Program Bansos-RTLH ini juga bertujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

## 2. Program dan Indikator rumah tidak layak huni

Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan/atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi, sebagai berikut<sup>78</sup>:

- a. Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah
- b. Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk
- c. Lantai terbuat dari tanah/kayu/semèn/tegel dengan kondisi tidak baik, rusak, atau kualitas rendah
- d. Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai
- e. Tidak memiliki jamban/memiliki jamban tidak layak
- f. Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut di atas, selanjutnya calon penerima bantuan di setiap desa/kelurahan

---

<sup>77</sup> Rahmawati Zania, *Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018) hal. 8.

<sup>78</sup> Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah tidak Layak Huni.

dalam satu kecamatan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 kepala keluarga dan maksimal 15 kepala keluarga yang difasilitasi oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dibentuklah suatu kepengurusan dalam kelompok tersebut yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

### 3. Evaluasi

Kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai istilah dari 'penilaian', yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati, oleh sebab itu, tidak mengherankan jika, tanpa kita sadari, setiap saat kita telah melakukan evaluasi, baik dirumah, diperjalanan, atau di tempat pekerjaan, bagaimana harus bersikap dengan orang yang sedang kita hadapi, ataupun menilai kegiatan yang dilakukan orang lain atau yang kita kerjakan sendiri. Namapaknya dapat kita temukan beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi, yang mencakup:

- a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu objek
- b. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita miliki atau kita ketahui.
- c. Melakukan penilaian atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 264-265

Sehubungan dengan itu, Frutchey mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Membandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
- c. Pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati.<sup>80</sup>

Pengertian seperti itu, juga dikemukakan oleh Soumelis yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu objek. Sedang Seepersad dan Henderson mengartikan evaluasi sebagai kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada.<sup>81</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan itu, terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian evaluasi sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi:

- a. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta
- b. Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
- d. Penilaian dan pengambilan keputusan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 264 -265

<sup>81</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 265

<sup>82</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 265

Terdapat beberapa macam evaluasi yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif

Taylor mengemukakan adanya dua macam evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan, sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilakukan. Sedangkan evaluasi sumatif adalah merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilakukan/dilaksanakan.<sup>83</sup>

b. *On-going evaluation* dan *ex-post evaluation*

Pemisahan dalam dua bentuk, juga dikemukakan oleh Cernea dan Tepping yang membedakan adanya *On-going evaluation* dan *ex-post evaluation*. *On-going evaluation*, adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih sedang berjalan, yang dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibanding program atau rencana yang telah ditetapkan, sekaligus (jika ditemukan penyimpangan) segera merumuskan langkah-langkah pengamanan untuk mengatasinya. Dengan demikian, penyimpangan yang tidak terjadi terlalu besar, dan segera dapat diluruskan sesuai dengan yang direncanakan. Berbeda dengan *on-going evaluation*, *ex-post evaluation*, sebenarnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi

---

<sup>83</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 266

yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan yang direncanakan telah selesai dikerjakan. Tujuan dari kegiatan evaluasi seperti ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, dan seberapa jauh telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya.<sup>84</sup>

c. Evaluasi intern dan evaluasi ekstern

Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan evaluasi, atau siapa yang melakukan evaluasi, kegiatan evaluasi, juga dapat dibedakan antara evaluasi intern dan evaluasi ekstern. Pada evaluasi intern, pengambil inisiatif diadakannya evaluasi maupun pelaksana kegiatan evaluasi adalah orang-orang atau aparat yang terlibat langsung dengan program yang bersangkutan atau orang-orang maupun aparat didalam organisasi pemilik/pelaksana program yang memiliki fungsi atau tugas untuk mengevaluasi program yang dikerjakan. Sedang evaluasi ekstern adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar (di luar organisasi pemilik/ pelaksana program), meskipun inisiatif dilakukannya evaluasi dapat muncul dari kalangan orang luar, atau justru diminta oleh organisasi pemilik program yang bersangkutan.<sup>85</sup>

d. Evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi

Dilihat dari aspek kegiatan yang dievaluasi, dikenal adanya evaluasi teknis (fisik) dan evaluasi ekonomi (keuangan). Evaluasi teknis adalah kegiatan evaluasi yang penerima manfaat dan ukurannya

---

<sup>84</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 266-267

<sup>85</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 267

menggunakan ukuran-ukuran teknis, seperti seberapa jauh volume kegiatan telah dapat diselesaikan, seberapa jauh persyaratan teknis telah ditepati, berapa jumlah orang yang terlibat/ terjangkau oleh program yang dilaksanakan, bagaimana kualitas bahan yang digunakan, ataupun kualitas fisik dari kegiatan yang dihasilkan, dll. Sedangkan evaluasi ekonomi atau keuangan, penerima manfaatnya adalah pengelolaan keuangan dan menggunakan ukuran-ukuran ekonomi seperti seberapa jauh administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, berapa persen (%) realisasi pengeluaran yang telah dilaksanakan, berapa nilai manfaat yang diperoleh program yang telah dilaksanakan disbanding dengan besarnya biaya dikeluarkan.<sup>86</sup>

e. Evaluasi program, pemantauan, dan evaluasi dampak program

Berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh penulis terdahulu, Rossi mengenalkan tiga tipe evaluasi, yaitu dengan membedakan kegiatan evaluasi dalam:

1) evaluasi terhadap program,

Evaluasi program: Adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/

---

<sup>86</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 267-268

patokan yang diberikan. Selain itu, juga dimaksud agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dalam program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan. Karena itu, dalam evaluasi program, selain dievaluasi tentang bagaimana proses perumusan program juga dievaluasi tentang semua unsur program, yang menyangkut: pengumpulan data/ informasi, analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut: kegiatan yang akan dilaksanakan, metode yang akan diterapkan, penerima manfaat kegiatan, volume kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan.<sup>87</sup>

Tentang evaluasi program ini, secara khusus Rossi, dkk.

Sangat menekankan pentingnya kegiatan evaluasi terhadap:

- a) Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi (kekhususan) kelompok penerima manfaat program tersebut;
- b) Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- c) Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan.
- d) Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan itu.

---

<sup>87</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 269-270

## 2) pemantauan atau monitoring program

Pemantauan program: diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data dan fakta) dan pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program, dengan maksud untuk menghindari terjadinya keadaan-keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk keperluan tersebut, Rossi, dkk menekankan agar kegiatan pemantauan diarahkan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan: (a) apakah program yang dilaksanakan tersebut telah benar-benar telah dapat mencapai individu-individu atau kelompok-kelompok yang menjadi penerima manfaat program tersebut. (b) apakah program telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya, memberikan pelayanan, dan memperoleh manfaat seperti yang telah direncanakan.<sup>88</sup>

## 3) evaluasi terhadap dampak program.<sup>89</sup>

Evaluasi dampak program: sebagian besar kegiatan evaluasi umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan

---

<sup>88</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 270

<sup>89</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 269

program yang telah direncanakan. Kegiatan seperti ini, hanya dapat dilakukan jika tujuan program benar-benar dirumuskan hanya dapat dilakukan jika tujuan benar-benar dirumuskan secara jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya, baik yang menyangkut perubahan perilaku, perilaku, atau ukuran-ukuran yang lain seperti: tingkat produktivitas, tingkat kelahiran/kematian, dll. Karena itu, Rossi, dkk mengingatkan agar: (a) tujuan program harus cukup jelas dan dirumuskan secara operasional sehingga mudah diukur, atau paling tidak, setiap pelaksana evaluasi tahu pasti tentang ukuran-ukuran yang akan harus digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang bersangkutan. (b) semua kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan tentang hal-hal kritis yang mempengaruhi keberhasilan program. Dengan perkataan lain, program harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga dapat direncanakan itu disebabkan karena ketidakbaikan program ataukah ketidakbaikan pelaksanaan program itu sendiri.<sup>90</sup>

Evaluasi proses dan evaluasi program dari berbagai evaluasi yang telah dikemukakan diatas, sebenarnya dapat disimpulkan adanya dua macam kegiatan evaluasi, yaitu:

- a) Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah

---

<sup>90</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 270-271

dilaksanakan itu sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan didalam programnya;

b) Evaluasi hasil, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah dapat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif.<sup>91</sup>

f. Tujuan evaluasi

Evaluasi telah merujuk kedua pengertian yakni: pengukuran dan interpretasi yang keduanya sangat diperlukan untuk melakukan penilaian atau pengambilan keputusan . Dengan pengukuran, berarti kita berhadapan dengan kegiatan untuk membandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain yang menjadi ukurannya, sedangkan interpretasi mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengartikan data atau fakta yang dihasilkan dari pengukuran tersebut.<sup>92</sup>

Dengan demikian, melalui kegiatan evaluasi, kita akan dapat mengambil kesimpulan tentang segala sesuatu yang telah terjadi, sekaligus memberikan landasan dan arahan bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan. Selaras dengan itu, Stufflebeam mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah

---

<sup>91</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 271

<sup>92</sup> Aprillia theresia dkk, *pembangunan berbasis masyarakat*, (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm 290-291

sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan (diskrepansi) antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.<sup>93</sup>

g. Kegunaan evaluasi

Valeri, dkk mengemukakan adanya tiga matra atau dimensi tujuan evaluasi, yang terdiri atas:

1) Kegunaan operasional

a) Melalui evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

b) Melalui evaluasi, dapat kita lakukan perubahan-perubahan, modifikasi supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

c) Melalui evaluasi akan dapat dikembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelapor kegiatan.<sup>94</sup>

2) Kegunaan analitis bagi pengembangan program, yang mencakup:

a) Untuk mengembangkan dan mempertajam tujuan program dan perumusannya.

---

<sup>93</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 271-272

<sup>94</sup> Aprillia theresia dkk, *pembangunan berbasis masyarakat*, (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm 291

- b) Untuk menguji asumsi-asumsi yang digunakan, dan untuk lebih menegaskan lagi secara eksplit.
  - c) Untuk membantu dalam mengkaji ulang proses kegiatan demi terciptanya tujuan akhir yang dikehendaki.<sup>95</sup>
- 3) Kegunaan kebijakan, yang mencakup:
- a) Berlandaskan hasil evaluasi, dapat dirumuskan kembali, strategi pembangunan, pendekatan yang digunakan, serta asumsi-asumsi dan hipotesis—ipotesis yang akan diuji.
  - b) Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan dimasa-masa mendatang.<sup>96</sup>

Dilain pihak, dilihat dari sudut pandang berbeda, Mardikanto dan Sutarni menggunakan tiga matra kegunaan evaluasi pemberdayaan yang mencakup:

- (1). Kegunaan bagi kegiatan pemberdayaan itu sendiri, yakni:
- (a) Untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan telah dicapai
  - (b) Untuk mencari bukti, apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah semua perubahan-perubahan yang terjadi memang sesuai dengan penerima manfaat yang diinginkan.

---

<sup>95</sup> Aprillia theresia dkk, *pembangunan berbasis masyarakat*,(Bandung, Alfabeta, 2014) hlm 291-292

<sup>96</sup> Aprillia theresia dkk, *pembangunan berbasis masyarakat*,(Bandung, Alfabeta, 2014) hlm 292

- (c) Untuk mengetahui segala masalah yang muncul/dijumpai, yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan.
- (d) Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan metode-metode pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
- (e) Untuk menarik simpati para aparat dan warga masyarakat, bahwa program yang telah dilaksanakan itu memang memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh untuk selanjutnya, dengan adanya simpati mereka itu diharapkan lebih meningkatkan aktivitas dan partisipasi mereka dalam kegiatan pemberdayaan dimasa mendatang.<sup>97</sup>

(2). Kegunaan bagi aparat pemberdayaan, yang meliputi:

- (a) Adanya kegiatan evaluasi, fasilitator merasa diperhatikan dan tidak dilupakan, sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas kegiatan pemberdayaan dimasa mendatang.
- (b) Melalui evaluasi, seringkali juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas atau mutu kegiatan fasilitator itu sendiri, yang sangat penting

---

<sup>97</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalm perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 273-274

artinya karena melalui evaluasi biasanya juga akan menentukan masa depan/ promosi bagi pengembangan karir yang bersangkutan.

(c) Dengan adanya kegiatan evaluasi, setiap fasilitator akan selalu mawas diri, dan selalu berusaha agar kegiatannya dapat dinilai baik, sehingga akan membiasakan dirinya untuk bekerja tekun dan penuh tanggung jawab.<sup>98</sup>

(3). Kegunaan bagi pelaksana evaluasi, yang berupa:

(a) Kebiasaan untuk mengemukakan pendapat berdasarkan data atau fakta dan bukan didasarkan pada asumsi, praduga, atau intisi semata.

(b) Kebiasaan bekerja sistematis, sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan.

(c) Memperoleh peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknik pengukuran yang tepat dan teliti, teknik pengumpulan data yang andal, dan teknik analisis yang tepat dan tajam.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 274

<sup>99</sup> Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 274

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menggunakan manusia sebagai instrumen dan berusaha menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratories lokasi penelitian. Lexy J. Moeleong yang mengutip pendapat Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>100</sup> Dengan demikian data yang diperoleh adalah kata-kata (wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain) berupa informasi yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah Desa Maos Kidul

#### **B. Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi penelitian Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Berdasarkan keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Maos Kidul dalam menerapkan strategi pembangunan dalam meminimalisir kemiskinan di Desa Maos kidul sehingga dapat memberikan dampak yang baik di kalangan masyarakat Maos Kidul, merupakan alasan peneliti untuk mengamati lebih jauh bagaimana

---

<sup>100</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2001), hlm 3.

penanggulangan kemiskinan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos Kidul.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat yang dipermasalahkan.<sup>101</sup> Yang menjadi subjek penelitian adalah :

1. Camat Maos
2. Kepala Desa Maos kidul.
3. Perangkat Desa Maos kidul.
4. Anggota penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni.

Sedangkan Objek penelitiannya adalah apa yang menjadi titik perhatian.<sup>102</sup> Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi program pemugran rumah tidak layak huni di Desa Maos Kidul.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data skunder (*secondary data*).<sup>103</sup>

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, dan satu responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai data primer. Oleh karena

---

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 116

<sup>102</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 289

<sup>103</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 289

itu, ketika merancang pertanyaan, dibedakan tipe pertanyaan, yakni pertanyaan faktual personal yang didalamnya responden memberikan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut diri, sikap, dan perilaku; pertanyaan faktual tentang orang lain yang didalamnya responden memberikan informasi tentang orang lain; dan pertanyaan faktual informan yang didalamnya kita menempatkan orang yang diwawancarai dalam posisi informan dari pada sebagai responden yang menjawab tentang diri mereka sendiri. Data sumber primer meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.<sup>104</sup>

## 2. Sumber Skunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Bahan-bahan sumber data sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, dan jurnal-jurnal yang mengevaluasi atau mengkritisi suatu penelitian original yang lain.<sup>105</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dan sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

---

<sup>104</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 289.

<sup>105</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>106</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>107</sup> Teknik ini adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak secara langsung maupun tidak secara langsung pada objek penelitian ditempat suatu peristiwa, keadaan, atau situasi yang sedang terjadi.<sup>108</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pengamatan langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan khususnya rumah tidak layak huni. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Maos kidul

#### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

---

<sup>106</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

<sup>107</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 203.

<sup>108</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

Hubungan antara penginterview dan yang diinterview bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri.<sup>109</sup>

Menurut Janet M. Ruane, wawancara dibagi menjadi dua yakni: wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara formal lebih terstruktur dari pada wawancara informal.<sup>110</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih menggunakan wawancara informal untuk mengurangi ketegangan saat wawancara. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara langsung dengan objek penelitian. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>111</sup>

Pada prosesnya, wawancara dapat dilakukan dengan model bebas mendalam dan terstruktur. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas mendalam kepada warga Desa Maos Kidul (penerima bantuan). Wawancara bebas mendalam yaitu interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai berupa tanya jawab dimana pewawancara tidak menggunakan pedoman pertanyaan akan tetapi beberapa pertanyaan telah disiapkan sebagai dasar wawancara. Wawancara tidak langsung telah dilakukan peneliti sebagai referensi untuk mewawancarai subjek penelitian.

---

<sup>109</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.113.

<sup>110</sup> Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Panduan Riset Ilmu Sosial)*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 255.

<sup>111</sup> Imam Suprayogi, Tobroni, "*Metodologi penelitian Sosial-Agama*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 172.

### 3. Dokumentasi

Untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi sehingga di dapatkan data yang maksimal, penelitian kualitatif memberi alternatif supaya ketiga setelah pengamatan dan wawancara sebagai cara yang paling dominan yaitu kajian terhadap dokumen/ bahan tertulis, yang lazim disebut dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda. Dan sebagainya.<sup>112</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dokumenter seperti: letak geografis, struktur organisasi, gambar-gambar keadaan lingkungan Desa Maos Kidul serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Maos Kidul.

### F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.<sup>113</sup> Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang tepat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>114</sup> Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

<sup>112</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,...hlm 231.

<sup>113</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*,...(Bandung: PT. Refika Aditma, 2012), Hlm. 332.

<sup>114</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*....Hlm 332.

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>115</sup> Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuat ringkasan kontak yang berisi uraian hasil penelitian yang terhadap catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawaban terhadap masalah yang diteliti, dan bagaimana implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>116</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini dituangkan dalam bentuk kata kata, kalimat kalimat, ataupun paragraf paragraf yang akan disajikan dalam bentuk teks ataupun uraian naratif. Atau paragraf paragraf, baik penuturan informan, hasil observasi dan dokumentasi, agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan telursuri kembali kebenarnya, maka selanjutnya diberi catatan kaki .

---

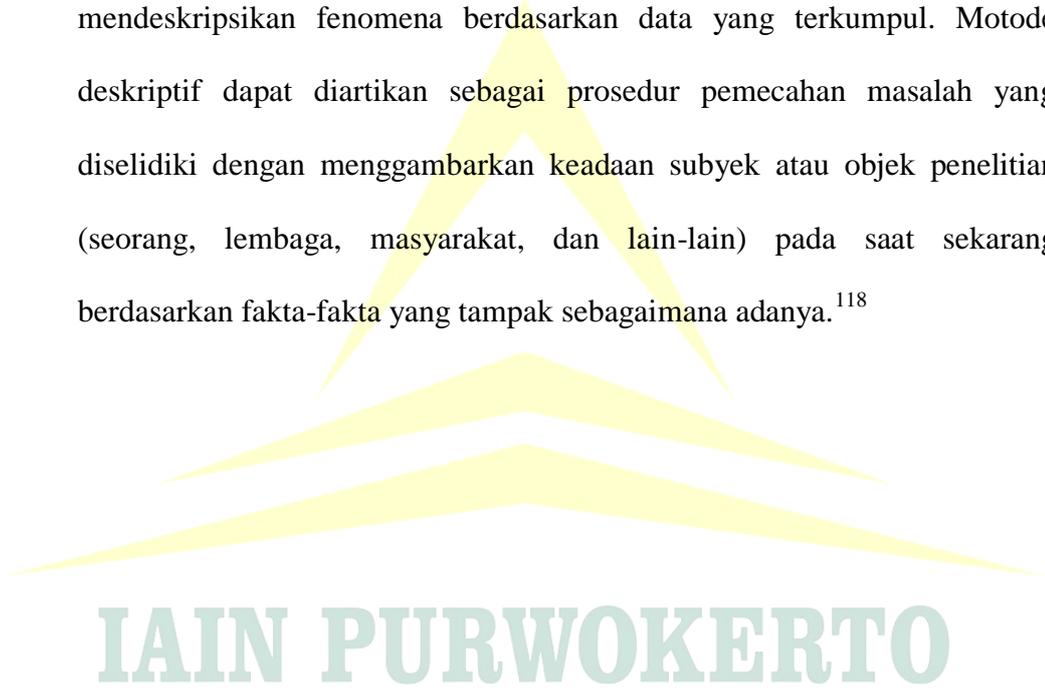
<sup>115</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 338-339

<sup>116</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 341.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini.<sup>117</sup>

Analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data, digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan secara mendalam tentang efektifitas manajemen kebersihan. Pada skripsi ini penulis menganalisa menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>118</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>117</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...hlm. 345

<sup>118</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 63.

## **BAB IV PENYAJIAN DATA**

### **A. Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat di Desa Maos Kidul**

Maos adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Ibukota kecamatan berada di Desa Klapagada. Desa Maos Kidul terdiri dari jumlah RW4, jumlah RT 28. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sampang disebelah utara, Kecamatan Kroya di timur, Kecamatan Adipala di sebelah selatan, dan Kecamatan kesugihan disebelah barat. Desa Maos kidul berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Desa Maos Lor
- b. Sebelah timur : Desa Klaijaran dan Desa Mrenek
- c. Sebelah selatan : Desa Klapagada
- d. Sebelah Barat : Desa Karangrena

Maos kidul merupakan salah satu desa di Kabupaten Cilacap dengan jarak tempuh ke kabupaten sekitar 27 km. Luas wilayah desa Maos kidul sekitar 300 ha. Wilayahnya sebagian untuk pemukiman dan sisanya digunakan untuk tanah pertanian. Secara terperinci pembagian tanah wilayah Desa Maos kidul adalah:

- a. Tanah sawah : 174,316 ha.
- b. Pekarangan : 112,684 ha.
- c. Lapangan : 1,00 ha.
- d. Pemukiman : 284 ha.

Dari luas areal pesawahan tersebut seluruhnya merupakan tanah irigasi teknis. Wilayah Maos merupakan dataran rendah dengan ketinggian

rata-rata 8 mdpl. Secara ekonomis desa Maos kidul merupakan daerah yang strategis, karena dilalui jalur utama masuk ke Kota Cilacap dari arah timur.

#### 1. Sejarah Desa Maos Kidul

Pada masalalu sebelum ada nama desa di daerah ini dihuni oleh Mbah Wongsodipuro, Mbah Pancongales, dan Mbah Gumbriil. Pada tahun 1515 daerah ini kedatangan dua orang laki-laki dan perempuan yang bernama Mbah Patra Kusuma dan Nyi Roh Esti, mereka bukan sepasang suami istri melainkan Nyi Roh Esti adalah sepupu dari Mbah Patra Kusuma. Kedatangan mereka bertempat tinggal dirumah Mbah Wongso Dipuro. Pada waktu itu kehidupan sehari-hari Mbah Mbah Wongso Dipuro bercocok tanam (petani) jahe. Dalam kesehariannya Mbah Patra Kusuma dan Nyi Roh Esti sering berpergian keluar daerah terutama ke daerah Cikakak (Wangon). Karena bertempat tinggal satu rumah dan setiap hari berkumpul maka Mbah Wongso Dipuro semakin mengenal Mbah Patra Kusuma dan Nyi Roh Esti bahwa mereka berdua adalah orang-orang keturunan dari kerajaan Mataram melihat dari pakaian yang dipakai oleh Mbah Patra Kusuma diantaranya adalah pakaian hitam-hitam iket welung, pakaian jubah berwarna putih, dan pakaian jubah berwarna hijau gading.

Karena Mbah Wongso Dipuro merasa hubungannya semakin dekat, maka pada suatu malam hari Mbah Wongso Dpuro bertanya kepada Mbah Patra Kusuma dengan bahasa jawa “kula waos panjenengan punika sanes titah manungsa ingkang limrah kalian titah sanesipun” yang artinya

“saya amati bahwa kamu itu bukanlah keturunan seperti orang-orang biasa”. Kalimat itu diucapkan oleh Mbah Wongso dipuro sampai tujuh kali. Karena pada saat itu daerah ini belum ada namanya maka kalimat itu oleh Mbah Patra Kusuma dijadikan sebagai nama daerah ini dengan mengambil kata “MAOS” yang diucapkan dengan kata “MAOS” yang artinya membaca atau mengamati. Sejak saat itu daerah ini dikenal dengan nama Maos. Kaeran adanya perkembangan jaman dan kepadatan penduduk maka pada tahun 1910 Desa Maos dipecah menjadi dua yaitu Desa Maos lor dan Desa Maos kidul, setelah bertahun-tahun laju perkembangan jaman dan kepadatan penduduk semakin padat Desa Maos Kidul dipecah lagi menjadi dua desa yaitu Desa Maos kidul dan Desa Klapagada pada tahun 1994.

## 2. Keadaan Demografis

### a. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Maos kidul kurang lebih 6,859 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 3,433 jiwa, penduduk perempuan 3,426 jiwa. Jumlah penduduk merupakan salah satu modal penentu pembangunan yang potensial. Partisipasi mereka baik yang berupa pikiran maupun tenaga sangat menentukan suatu keberhasilan pembangunan.

Dari data diatas, maka tingkat kepadatan penduduk tergolong cukup padat. Sebagai mana penduduk desa lain di kecamatan Maos ternyata penduduk Maos kidul sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

➤ **JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN**

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum/tidak bekerja	923	833	1.756
2	Mengurus rumah tangga		1.206	1.206
3	Pelajar/mahasiswa	460	395	855
4	Pensiunan	57	42	99
5	PNS	64	52	116
6	TNI	10	1	11
7	Kepolisian RI	9		9
8	Perdagangan	4	5	9
9	Petani	161	92	253
10	Peternak		1	1
11	Nelayan	1		1
12	Karyawan swasta	416	195	611
13	Karyawan BUMN	11	2	13
14	Karyawan BUMD	2		2
15	Karyawan honorer	11	6	17
16	Buruh harian lepas	740	296	1.036
17	Buruh tani	224	125	349
18	Pembantu rumah tangga	1		1
19	Tukang batu	1		1
20	Tukang kayu	1		1
21	Tukang jahit		1	1
22	mekanik	1		1

Kemiskinan yang berada di Desa Maos Kidul yaitu keadaan seseorang tidak mampu dalam memenuhi dasar kebutuhan hidup atau serba kekurangan karena berpenghasilan rendah, hal ini sesuai dengan arti kemiskinan menurut KBBI dan BPS, di wilayah Desa Maos kidul sendiri untuk warga yang terdaftar menjadi masyarakat miskin tiga tahun terakhir berjumlah 194 KK, hal ini juga diperkuat wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak Arif priambodo dan kepala desa Bapak Santoso Alip Wibowo sebagai berikut:

“untuk wilayah Desa Maos Kidul sendiri masyarakat miskin berjumlah 194 KK”.<sup>119</sup>

“wilayah Desa Maos Kidul masyarakat miskin berjumlah 194 KK”.<sup>120</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada Bapak Arief Priambodo dan Bapak Santoso Alip Wibowo tentang jumlah warga miskin di desa.

Kemiskinan yang terjadi di Desa Maos Kidul diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya, (a) tingkat pendidikan yang rendah rata-rata pendidikan yang di tempuh untuk orang tua sekarang sebagian besar hanya tamatan SD,(b) lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan merupakan masalah yang sejak dulu ada di Indonesia tak terkecuali di Desa Maos Kidul sendiri, (c) cacat fisik atau orang berkebutuhan khusus, wilayah Maos Kidul ada 15 orang berkebutuhan khusus sebagian besar sudah memiliki keluarga dengan kebutuhan khususnya tersebut dan tidak adanya wadah yang menampung itu menjadi penyebab faktor kemiskinan juga.

Pada bab II telah disebutkan macam macam kemiskinan, kemiskinan yang dapat dijumpai di desa yaitu kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Arief Priambodo:

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Arief Priambodo, pada 23-01-20, pukul 09.00 wib

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul, Bapak Santoso Alip Wibowo, pada 23-01-20, pukul 18.30 wib

“untuk masalah kemiskinan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kultur dimana sikap seseorang itu sendiri yang tidak mau bekerja keras, tidak kreatif dan tidak berusaha semaksimal mungkin memperbaiki tingkat kehidupan”<sup>121</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada Bapak Arif Priambodo tentang faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di desa.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang hampir ada di setiap daerah, tak terkecuali Desa Maos Kidul, ada beberapa teori kemiskinan yang disampaikan pada bab II, salah satunya yaitu bahwa kemiskinan bukan merupakan masalah individu melainkan masalah bersama atau institusional (melembaga). Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan bapak kades dan bapak camat sebagai berikut:

“masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama bukan masalah individu, karena dengan menangani bersama kita bisa saling membantu satu sama lain”<sup>122</sup>

“untuk masalah kemiskinan itu sendiri adalah masalah yang harus kita hadapi bersama”<sup>123</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada bapak Santoso Alip Wibowo dan Bapak Edy Suyoto tentang bagaimana kemiskinan itu.

Oleh sebab itu pemerintah khususnya perangkat desa melakukan tindakan agar masalah kemiskinan dapat diatasi, salah satunya yaitu memberikan program bantuan pemugaran rumah tidak layak huni atau masyarakat sekitar menamai program beda rumah. Tujuan diadakan

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Arief Priambodo, pada 23-01-20, pukul 09.00 wib

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul, Bapak Santoso Alip Wibowo, pada 23-01-20, pukul 18.30 wib.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Camat Maos, Bapak Edy Suyoto, pada 24-01-20, pukul 09.30 wib.

program ini adalah membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah yang sesuai dengan standar yang layak. Hal ini di perkuat dengan kutipan wawancara dengan salah satu perangkat Desa Maos Kidul Bapak Kasidin sebagai berikut:

“Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Desa Maos Kidul salah satunya dengan cara memberikan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni yang berupa material untuk membangun rumah, memberikan bantuan swadaya masyarakat untuk ikut membantu proses pembangunan rumah”<sup>124</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada Bapak Kasidin tentang mengatasi masalah kemiskinan.

Untuk melihat bahwa masyarakat yang dikategorikan miskin serta patut untuk menerima bantuan, pemerintah Desa Maos Kidul melihat beberapa indikator yang terdapat di peraturan bupati tahun 2019. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Kasidin sebagai berikut:

“untuk memilih siapa saja yang akan menerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni kami dari pemerintah desa melihat syarat atau indikator masyarakat miskin khususnya yang mempunyai rumah tidak layak huni dengan mendatangi langsung tempat tinggal mereka”<sup>125</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada Bapak Kasidin tentang indikator penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni.

Di Desa Maos Kidul sendiri terdapat banyak masyarakat miskin akan tetapi penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni yaitu tiga orang, tiga orang tersebut sudah diseleksi dengan ketat untuk menghindari komentar negatif dari warga yang tidak menerima bantuan tersebut, hal ini

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 08.30 wib.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 18.30 wib.

diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul sebagai berikut:

“warga msyarakat yang menerima bantuan program pemugaran rumah tidak layak huni berjumlah tiga orang yaitu Bapak Darso, Bapak Adman, Bapak Giyo.”<sup>126</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada kepala desa Bapak Santoso Alip Wibowo tentang siapa saja warga yang menerima bantuan

Alasan mereka mendapatkan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni dikarenakan layak dan sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan tersebut adalah:

- a. Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah
- b. Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk
- c. Lantai terbuat dari tanah/kayu/semèn/tegel dengan kondisi tidak baik, rusak, atau kualitas rendah
- d. Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai
- e. Tidak memiliki jamban/memiliki jamban tidak layak

## **B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Desa Maos Kidul**

Menurut KBBI kemiskinan merupakan keadaan serba kekurangan atau berpenghasilan rendah, selain itu kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu situasi kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul, Bapak Santoso Alip Wibowo, pada 23-01-20, pukul 18.30 wib.

miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya.<sup>127</sup> Pada teori kemiskinan demokrasi sosial masalah kemiskinan bukan merupakan persoalan individu melainkan masalah struktural. Hal tersebut juga disampaikan oleh pemerintah Desa Maos Kidul, Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah Desa Maos Kidul mengatakan bahwa masalah kemiskinan bukan merupakan masalah individu melainkan struktural, hal ini diperkuat hasil wawancara dengan bapak camat sebagai berikut:

“kemiskinan merupakan masalah yang dapat di pecahkan secara bersama sama artinya kita saling tolong menolong baik materi maupun non materi, misalnya seperti pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni peran pemerintah desa sangat penting, karena proses awal sampai ahir pihak desa yang mengurus berkas-berkas dan didukung warga sekitar, intinya kita saling support untuk menanggulangi kemiskinan di desa ini”<sup>128</sup>

Pernyataan tersebut yang penulis tanyakan kepada camat Bapak Edy Suyoto tentang cara penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, untuk menambah penghasilan masyarakat miskin pemerintah Desa Maos Kidul juga membentuk kelompok usaha yang beranggotakan ibu PKK dan masyarakat miskin, hal ini diperkuat hasil wawancara dengan kepala Desa Maos Kidul:

“selain memberi bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, untuk mengurangi kemiskinan kami berkoordinasi dengan PKK membentuk sebuah kelompok usaha, usaha tersebut beranggotakan masyarakat miskin dan di atur oleh ibu-ibu PKK. Kegiatannya yaitu memberikan pelatihan membuat mkanan seperti kripik, roti dll.”<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015) hlm 2

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Camat Maos, Bapak Edy Suyoto , pada 24-01-20, pukul 09.30 wib.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Santoso Alip Wibowo, pada 23-01-20, pukul 18.30 wib

Pernyataan tersebut penulis menanyakan kepada kepala desa Bapak Santoso Alip Wibowo tentang pemberdayaan kepada masyarakat penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni.

Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi kemiskinan harus bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi-sosial. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Melihat pandangan di atas pemerintah desa memberikan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat miskin terutama lansia berupa pemotongan harga pada saat memeriksa di PKD ( Poliklinik Kesehatan Desa) selain itu menggratiskan semua jenis pelayanan dari RT sampai desa.

### **C. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Maos Kidul Kabupaten Cilacap**

Program RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian baik secara teknis

maupun non teknis. Rumah tidak layak huni juga dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni baik sebagian maupun keseluruhan yang dilakukan gotong royong. Dalam pelaksanaan pemugaran rumah tidak layak huni memiliki tahapan tahapan yang tertera pada peraturan bupati tentang tatacara pelaksanaan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Kasidin sebagai berikut:

“untuk tahap proses pemugaran rumah tidak layak huni kami pemerintah desa mengacu pada peraturan bupati tentang tatacara pelaksanaan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni”<sup>130</sup>

Pernyataan tersebut penulis menanyakan kepada Bapak Kasidin tentang bagaimana proses pemugaran rumah tidak layak huni.

Warga yang memperoleh bantuan program pemugaran rumah tidak layak huni:

<b>Nama penerima bantuan</b>	<b>Alamat penerima bantuan</b>
Adman	Jl. Penatusan timur RT 05 RW 02
Darso	Jl. Tirtapati timur RT 01 RW 04
Wagiyo	Jl. Tirtapati barat RT 07 RW 03

Dengan adanya program pemugaran rumah tidak layak huni kemiskinan di Desa Maos Kidul bisa sedikit teratasi hal ini diperkuat hasil wawancara dengan salah satu penerima bantuan yaitu bapak Giyo sebagai berikut:

“dengan adanya bantuan ini masalah kemiskinan yang saya hadapi sedikit dapat tertolong karena saya tidak memikirkan lagi uang yang diperlukan untuk merenovasi rumah, sekarang saya hanya perlu fokus bagaimana agar rumah yang sudah diperbaiki pemerintah bisa saya

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 08.30 wib

jaga dengan baik dan lebih termotivasi lagi untuk lebih giat bekerja keras”<sup>131</sup>

Pernyataan tersebut penulis menanyakan kepada Bapak Giyo dampak program pemugaran rumah tidak layak huni terhadap perekonomian warga.

Disebuah kegiatan pasti ada tahap evaluasi tahap ini memang penting dikarenakan melalui kegiatan evaluasi, kita akan dapat mengambil kesimpulan tentang segala sesuatu yang telah terjadi, sekaligus memberikan landasan dan arahan bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan. Tidak hanya evaluasi saja, pada saat proses pembnguan pihak dari dinas terkait dan pemerintah desa juga melakukan monitoring, tindakan ini sesuai dengan teori yang ada pada bab II. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Kasidin sebagai berikut:

“pemerintah desa dan perwakilan dinas terkait selalu memantau atau memonitoring kegiatan dari awal proses pembelanjaan barang sampai ahir pembangunan, tidak hanya memonitoring saja kami pihak pemerintah desa dan dinas terkait juga mengevaluasi kegiatan tersebut dengan tujuan apa yang masih kurang atau belum maksimal bisa diperbaiki lagi untuk kegiatan selanjutnya”<sup>132</sup>

Pernyataan tersebut penulis menanyakan kepada Bapak Kasidin tentang bagaimana tahap evaluasi kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni.

#### **D. Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni**

Ada beberapa pengertian evaluasi yang disebutkan pada bab II, proses evaluasi program pemugaran rumah tidak layak huni dilakukan dua tahapan yaitu evaluasi pada saat proses pemugaran rumah tidak layak huni, proses

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan warga penerima bantuan, Bapak Wagiyono, pada 23-01-20, pukul 13.00 wib.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 08.30 wib

evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah desa dan dinas terkait, proses ini dilakukan setiap hari agar proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Kasidin sebagai berikut:

“pada saat proses evaluasi pemugaran rumah tidak layak huni pihak desa dan dinas terkait melakukan pengontrolan setiap hari ini bertujuan agar pada saat proses pembangunan bisa berjalan apa yang sudah dijelaskan”<sup>133</sup>

Pernyataan tersebut penulis menanyakan kepada Bapak Kasidin tentang bagaimana proses evaluasi program bantuan.

Selain evaluasi tersebut, untuk mengukur seberapa jauh tujuan program yang telah selesai, pihak dinas terkait dan pemerintah desa juga melakukan evaluasi hasil pembangunan evaluasi ini dilakukan pada saat pembangunan sudah selesai. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan bapak Kasidin sebagai berikut:

“Selain melakukan evaluasi pada saat proses pembangunan kami dan dinas terkait juga melakukan evaluasi lagi pada saat pembangunan selesai yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tujuan program tersebut.”<sup>134</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 08.30 wib

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Maos Kidul, Bapak Kasidin, pada 23-01-20, pukul 08.30 wib

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait “penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap”, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Maos Kidul masih terdapat masalah kemiskinan yang merupakan masalah yang sudah dari dahulu, faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, dan cacat fisik atau orang berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu masyarakat khususnya masyarakat miskin tidak dapat memiliki rumah yang layak dihuni. Oleh sebab itu pemerintah Desa Maos Kidul memberikan bantuan berupa pemugaran rumah tidak layak huni, bantuan tersebut bertujuan untuk memperbaiki rumah yang tadinya tidak layak menjadi layak dihuni, seperti pembangunan jamban dan memperbaiki lantai rumah, selain itu pemerintah Desa Maos Kidul juga memberikan bantuan berupa berobat gratis untuk lansia di PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) dan menggratiskan semua jenis pelayanan RT sampai desa. Serta pelatihan pembuatan makanan yang di kelola oleh PKK desa. Pada saat proses pembangunan rumah tidak layak huni pemerintah desa dengan dinas terkait selalu melakukan evaluasi, sehingga ditemukan faktor pendukung dan hambatan kegiatan seperti kekurangan dana, kurangnya antusias warga, akan

tetapi pembangunan rumah masih dapat diselesaikan dan angka kemiskinan dapat berkurang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak:

### **1. Pemerintah Desa Maos Kidul**

Perlu adanya peningkatan wawasan kepada penerima bantuan dari pihak pelaksana mengenai proses program pemugaran rumah tidak layak huni dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang program pemugaran rumah tidak layak huni sehingga tidak saling iri antara penerima bantuan dan bukan penerima bantuan. Selain itu lebih terbukanya masalah finansial agar semuanya jelas dana bantuan dibuat untuk keperluan apa saja.

### **2. Masyarakat Penerima Bantuan**

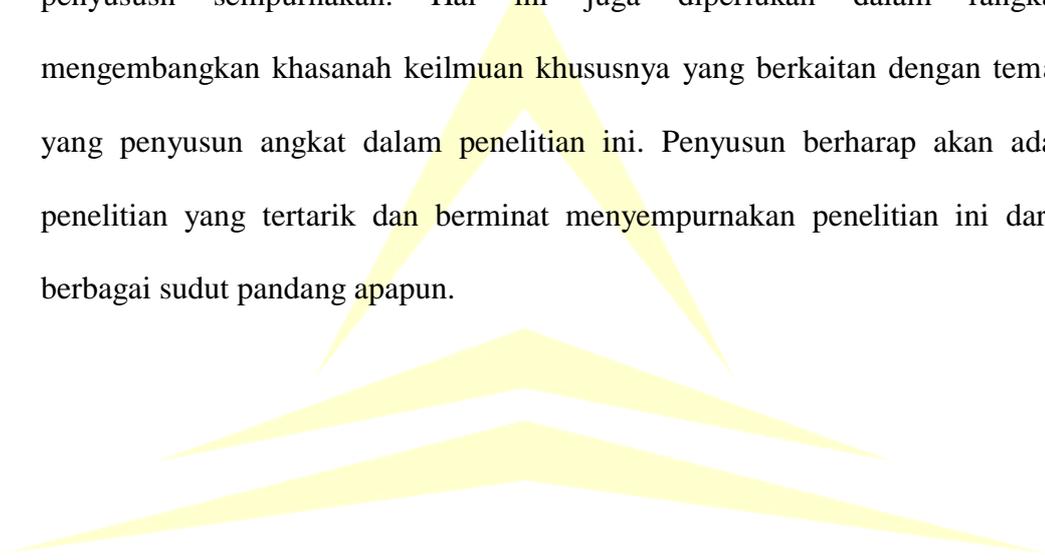
Pada proses pelaksanaan pemugaran rumah tidak layak huni, warga atau masyarakat harus aktif mengontrol kegiatan selama pengerjaan rumah agar hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan. Jangan semata-mata menyalahkan pemerintah desa atau yang lain apabila proses pemugaran rumah telah selesai, rumah yang diharapkan tidak memuaskan.

## **C. Penutup**

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUGARAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA MAOS KIDUL KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN” ini masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan waktu, tenaga, serta kemampuan dalam memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh sebab itu, kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan penelitian ini sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta Asna, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo, Dimuat dalam jurnal Administrasi Publik, (volume 1, Nomor, 2010)
- Arikunto Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta
- Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Meberdayakan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- I Dewa Gede Agung Diasana dan Anank Agung Gede Yana, Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, dimuat dalam jurnal Permukiman Natak,(volume 5, nomor 2)
- Khomsan ali dkk. 2015. Indikator kemiskinan. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis Aris Fauzi, Miskin Menurut Pandangan Al-Quran, dimuat dalam jurnal tansiq,(volume. 1, nomor.1)
- Mardikanto totok dan Soebianto Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moeloeng Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Moeloeng Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Nasution S. 2014. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratama Citra Yogi, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, dimuat dalam jurnal The journal of Tauhidinomics,(volume 1, nomor 1)
- Prawoto Nano, Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, dimuat dalam jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,( volume 9, nomor 1 2009)
- RI Departemen. 2010. Al Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: C.V Gema Risalah Pres.
- Ruane Janet M. 2013. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Panduan Riset Ilmu Sosial). Bandung: Nusa Media.

Sarimah, Pelaksanaan Pembangunan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dimuat dalam jurnal Pembangunan,(volume1, Nomor 1 2016)

Silalahi Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

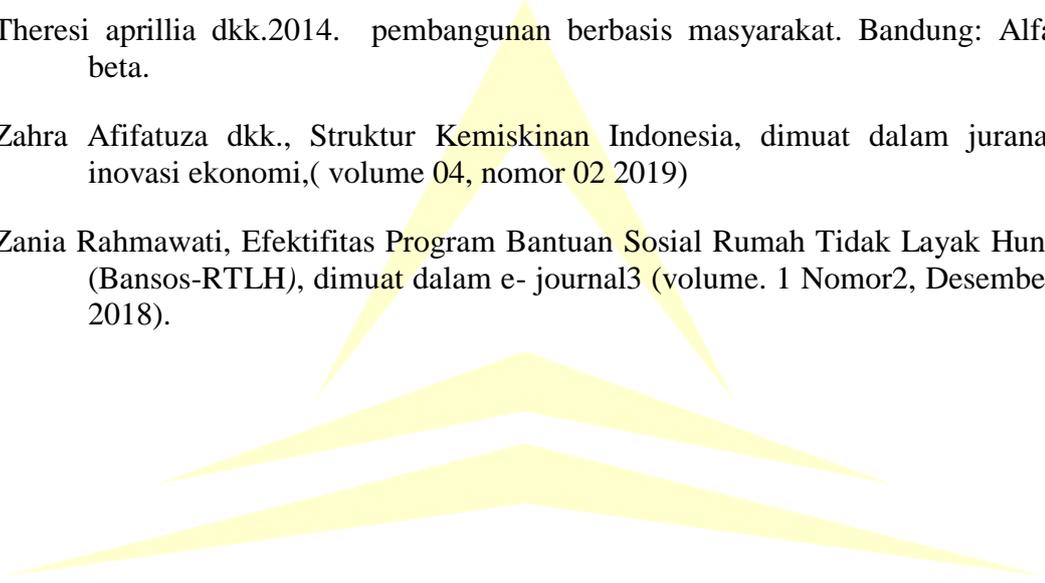
Suprayogi Imam dan Tobroni. 2003. Metodologi penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suryawati Chriswardani, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, dimuat dalam jurnal JMPK(volume 08, nomor 03 2005)

Theresi aprillia dkk.2014. pembangunan berbasis masyarakat. Bandung: Alfa beta.

Zahra Afifatuza dkk., Struktur Kemiskinan Indonesia, dimuat dalam jurnanl inovasi ekonomi,( volume 04, nomor 02 2019)

Zania Rahmawati, Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH), dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018).



**IAIN PURWOKERTO**